

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA

**PENERAPAN KONSEP "SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMPERSIAPKAN
MASA DEPAN**

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TELAH TERDAFTAR

JUDUL : _____
PENGARANG : _____
JENIS : _____
NOMOR : 014/J.41.12/PK/PA/2004
TANGGAL : _____

KEPALA.

Oleh
Dr. Idris, M.Si.

Munaldi
Munaldi, M.Si.
131338275

MALIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

DITERIMA TEL.	17 FEB, '04
SUMBER/HARGA	HADIAH
KOLEKSI	K1
NO. INVENTARIS	31/K/2004-P. (2)
KLASIFIKASI	330.9 IDR. PD

**JURUSAN EKONOMI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2004

I. PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini hampir semua lapisan masyarakat membicarakan prospek penerapan sistem ekonomi pasar (*free market system*) secara global. Kerjasama ekonomi baik pada tataran regional dan global banyak dibentuk seperti WTO, APEC, EC, NAFTA sampai pada AFTA.

Perekonomian yang menyatu pada tataran global (*globalized economy*), hilangnya hambatan-hambatan tarif dan non-tarif, serta perubahan besar-besaran di bidang teknologi informasi telah menciptakan jalan "*bebas hambatan (by pass)*" Mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi global, akselerasi perdagangan internasional yang semakin fantastis, serta pendistribusian manfaat yang lebih besar kepada seluruh masyarakat dunia. Meningkatnya kapasitas ekonomi serta semakin tingginya mobilitas barang dan jasa, pada gilirannya akan terciptanya masyarakat dengan konsumsi yang tinggi (*high consumption*). Bila ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah jumlah pengeluaran konsumsi, tentu tingginya tingkat konsumsi masyarakat akan dipandang sebagai indikator terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan bebas dipandang sebagai angin surga yang menjanjikan banyak keuntungan bagi umat manusia terutama berkaitan dengan tiga pokok, yaitu meletakkan ekspansi industri manufaktur pada basis yang lebih rasional, mendistribusikan keuntungan perdagangan (*gains of trade*) pada komunitas yang lebih luas, serta menimbulkan persaingan yang intens sehingga muncul efisiensi

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADJARAN

yang pada gilirannya akan memberikan keuntungan ril kepada konsumen.

Walaupun ide perdagangan bebas global telah menjadi buah bibir selama satu setengah daswarsa terakhir, namun patut disayangkan bahwa diskursus publik belum menyentuh beberapa aspek substansial, khususnya yang menyangkut sisi negatif di balik euforia liberalisasi tersebut. Beberapa hal penting yang pantas diwaspadai di balik era liberalisasi tersebut, yaitu munculnya eksternalitas disekonomnis, mekanisme transfer industri kotor dari negara maju ke negara sedang berkembang, serta intrik dikotomis antara negara kaya dan miskin mengenai standarisasi lingkungan hidup. Bila hal itu tidak disikapi secara bijak, maka "*bom waktu*" akan meledak dengan dahsyatnya di kemudian hari.

Dalam masa penungguan bom waktu yang bakal akan meledak itu, saat ini kita telah mengalami berbagai macam krisis. Yang banyak disadari oleh masyarakat umum, baik para eksekutif maupun legislatif adalah krisis moneter, ekonomi, politik dan sosial. Berbagai macam krisis ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama disadari akan mengancam kelangsungan hidup negara kita. Namun ada krisis lain yang kurang atau bahkan tidak kita sadari, yaitu krisis lingkungan hidup yang ancamannya terhadap kelangsungan hidup negara kita yang tak kurang dahsyatnya, khususnya krisis lingkungan hidup yang bersifat *antropogenik (bukan bencana alam yang bebas dari ulah manusia)* . Walaupun krisis ini telah banyak memakan korban jiwa *maupun* harta benda yang sangat

banyak, namun perhatian kita hanyalah sesaat saja.

Pada musim kemarau kita disibukkan oleh masalah kekurangan air; baik untuk rumah tangga, industri, pertanian serta masalah kebakaran hutan, sementara pada musim hujan kita disibukkan oleh masalah banjir dan tanah longsor serta berbagai masalah ikutannya.

Masalah kerusakan lingkungan hidup sering bersifat kumulatif dan cenderung semakin meningkat. Jika kebijakan lingkungan hidup dan perilaku kita terhadap lingkungan hidup tidak berubah, ada bahaya riil bahwa kita berpeluang mengikuti sejarah negara purba *mesopotamia, maya dan astek* yang punah dipermukaan bumi oleh bencana lingkungan hidup yang mereka buat sendiri. Dari mata pelajaran sejarah, anak cucu kita nanti akan belajar bahwa pernah ada sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang indah penuh laksana zamrud yang terbentang di khatulistiwa dengan iklim yang nyaman, tanahnya subur, pemandangannya indah dan kaya akan sumberdaya alam, tetapi umurnya tidak sampai seabad lagi.

Sebuah pertanyaan muncul "*adakah alternatif strategi pembangunan untuk menghindarinya ?*"

II. MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebelum kita membicarakan tentang alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengulur atau menghintari meledaknya bom waktu perlu kita pahami hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Melalui pemahaman tersebut, akan membantu kita dalam menentukan strategi yang tepat untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Semua kegiatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Pembuangan sisa metabolisme manusia dalam bentuk air seni dan tinja saja juga berdampak terhadap lingkungan hidup. Pada waktu jumlah manusia masih sedikit, maka dampaknya akan sedikit atau kecil pula. Akibat pertumbuhan jumlah manusia, maka dampak kumulatif kegiatan hayati manusia akan semakin besar. Dampak itu akan semakin besar lagi dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologi yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan rekayasa dan meningkatkan penggunaan energi.

Pandangan *antroposentris* atas lingkungan hidup menempatkan kepentingan manusia di pusatnya. Kegiatan ekonomi akan mempengaruhi lingkungan hidup, sebagai akibat penggunaan sumberdaya, produksi limbah dan modifikasi lingkungan hidup. Jika dampak kegiatan ekonomi itu melampaui kemampuan lingkungan hidup untuk memulihkan diri dari dampak tersebut,

perubahan itu sering mengurangi kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bahkan bisa hilang atau punah. Bila kondisi ini terjadi berarti telah terjadi kerusakan lingkungan hidup (*damages*). Kita katakan rusaknya lingkungan hidup, adalah karena kita meninjau dari sudut kepentingan manusia. Kalau tidak dikaitkan dengan kepentingan manusia, maka tidak ada lingkungan yang rusak.

Mereka yang beraliran "*deep ecology*", mengkritik bahwa lingkungan hidup memiliki nilai tersendiri terlepas dari kepentingan manusia. Nilai tersendiri itu harus diberi hak eksistensi dan dihormati, di mana makhluk bukan manusia mempunyai hak hidup terlepas dari keuntungan yang diberikannya kepada manusia. Dalam kenyataan hidup antroposentris tetap dominan, buktinya semua orang setuju untuk membasmi *nyamuk malaria*, *Virus AIDS* dan *patogen* lainnya yang berbahaya. Bila terjadi konflik antara manusia dengan makhluk hidup lain dan kepentingan makhluk hidup lain yang dimenangkan, pada hakekatnya pertimbangannya adalah *antroposentris* juga. Alasan untuk melestarikan hutan (manusia dilarang menebang hutan secara sembrono), sebenarnya adalah untuk melindungi fungsi hidro-orologi hutan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati karena potensi ekonominya dan menghindari terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan banyak kesulitan-kesulitan sosial ekonomi yang besar.

Dalam dunia yang didominasi oleh ekonomi pasar, kelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, yaitu untung-rugi bersifat *intangible*

sering pula dipertimbangkan seperti estetika, kenyamanan, dan keanekaragaman hayati. Pada umumnya untung rugi yang bersifat *intangibile* sering dikalahkan oleh *tangible*, termasuk masalah kesehatan. Pembangunan industri yang menghasilkan limbah beracun sering dibuang ke lingkungan hidup (sungai). Walaupun ada protes, namun terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia, sering tidak cukup keras sehingga terabaikan. Pembangunan industri akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang bisa dinikmati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Walaupun kita tahu ada risikonya seperti harus menanggulangi keracunan oleh logam berat atau menderita sakit akibat mengkonsumsi merkuri, namun kadangkala kita mau menerimanya.

Pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi sering bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan, sehingga sering dikatakan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup sering terkesan kontradiktif. Bahkan ada yang berpandangan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat pembangunan merupakan suatu hal yang wajar terjadi, dan kerusakan lingkungan tersebut dipandang sebagai biaya dari pembangunan. Hal ini tidak selalu benar, karena antara dua kepentingan tersebut bisa saling berinteraksi, tetapi dapat diintegrasikan, sehingga kepentingan ekonomi dan lingkungan bisa sama-sama tercapai. Dengan kata lain antara kepentingan ekonomi kepentingan lingkungan memang berbeda, tetapi dapat dipadukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) atau

pembangunan yang ramah lingkungan.

Kontroversi antara lingkungan hidup dan pembangunan berlanjut dalam KTT Bumi (*United Nations Conference on Environment, UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 1992 (20 tahun setelah Konferensi Stockholm, 1972). Sampai sekarang pun persepsi lingkungan hidup versus pembangunan masih sangat umum, termasuk di Indonesia. Ditambah lagi dengan kecurigaan antara negara sedang berkembang dan negara maju belum terhapus.

Di Indonesia, para birokrat, pakar ekonomi dan juga pakar lingkungan hidup berpegang pada tesis "*bahwa pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan biaya tambahan*", sehingga mahal. Para pakar ekonomi dan birokrat khawatir bahwa pembangunan berwawasan lingkungan akan mengganggu terlaksananya kebijakan pemerintah yang meletakkan prioritas utama pada pembangunan ekonomi. Agrumentasi ini didukung oleh apa yang disebut sebagai kurva *Kurnets*, yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan yang rendah (masyarakat melarat), kenaikan pendapatan diikuti oleh kenaikan kerusakan lingkungan hidup. Baru pada tingkat pendapatan yang menengah masyarakat mampu menginvestasikan sebagian dari pendapatannya untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga pendapatan tinggi akan disertai oleh penurunan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain karena kita masih melarat, kenaikan kerusakan lingkungan hidup oleh pembangunan yang meningkatkan pendapatan dianggap tidak dapat dihindari, akibatnya pembangunan ekonomi yang menjadi

raja sedangkan lingkungan hidup menjadi terpinggirkan dan selalu dikalahkan. Baik secara eksplisit maupun implisit muncullah anggapan " *biarlah pembangunan merusak lingkungan hidup dulu, nanti setelah kita mampu, baru kita perbaiki lingkungan hidup kita*". Akibatnya para akademisi dan LSM yang membela lingkungan hidup sering di cap sebagai penghambat pembangunan.

Perlu kita sadari bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhitungkan lingkungan, maka kebijakan pembangunan ekonomi hanya akan menguntungkan dalam jangka pendek dan mengakibatkan degradasi lingkungan dari waktu ke waktu yang akhirnya mengakibatkan kapasitas pembangunan sumberdaya alam tidak lagi bisa menopang kehidupan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan adanya proses integrasi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan lebih lanjut dalam sebuah konsep yang dikenal "*sustainable development*".

III. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Semakin meningkatnya kasus-kasus dan masalah lingkungan baik di negara maju maupun di negara berkembang, sebagai pendorong utama munculnya gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali akan mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, tetapi juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Pelaksanaan pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan semata, tanpa mempertimbangkan masalah berkelanjutan, akan gagal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara hakiki. Oleh sebab itu pembangunan pertumbuhan harus diganti orientasi pembangunan pada berkelanjutan. Lebih gampang mencapai pertumbuhan ketimbang berkelanjutan, tetapi pertumbuhan lebih segera atau dalam jangka pendek dirasakan manfaatnya, sedangkan keberlanjutan manfaatnya akan dirasakan untuk jangka waktu yang tidak terhingga.

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali sebagai upaya untuk mengatasi bahaya polusi yang terjadi akhir tahun 60-an. Akibat dampak negatif dari perkembangan industri yang pesat. Kondisi ini melahirkan konferensi lingkungan hidup pertama yang diadakan di stockholm pada tahun 1972. Konsep ini berpijak dari suatu gagasan bahwa sumberdaya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah bersifat terbatas. Yang berhak atas sumberdaya tersebut adalah seluruh umat manusia, dalam arti generasi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang atau seluruh generasi. Agar semua

generasi dapat memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka perlu dicari suatu pendekatan dalam pembangunan, yaitu konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang ingin menyelaraskan antara aktivitas ekonomi dengan ketersediaan sumberdaya alam. Dalam perkembangannya konsep ini melahirkan berbagai pemikiran yang cukup bervariasi sesuai konteks dan kepentingan tertentu. Secara umum konsep ini mengacu pada upaya untuk mengharmoniskan dua kepentingan, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestasian sumberdaya alam dan lingkungan.

Secara formal konsep pembangunan berkelanjutan ditemukan dalam Brundlan Report " *Our Common Future (WCED, 1997)*", yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Implementasi dari konsep ini merupakan suatu proses perubahan dalam hal eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang berada dalam suatu keselarasan dan meningkatkan potensi masa kini dan masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi.

Sejak munculnya konsep pembangunan berkelanjutan selalu terjadi perdebatan, baik dikalangan akademisi, politisi maupun LSM. Yang diperdebatkan bukan masalah konsepnya, melainkan bagaimana konsep tersebut bisa terlaksana. Karena syarat untuk melaksanakan konsep tersebut tidak mudah untuk dipenuhi, dan konsep ini juga tidak dapat menghilangkan persepsi lingkungan hidup *versus* pembangunan.

Menurut *The Global Tomorrow Coalition (1990)*, menggambarkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus didasari pada 4 hal :

1. Pembangunan Ekonomi dan kesehatan lingkungan harus diintegrasikan mulai dari awal proses pengambilan keputusan (Kebijakan)
2. Masalah lingkungan harus dilihat secara komprehensif dan saling keterkaitannya.
3. Problema ekonomi dan lingkungan harus dilihat dalam kaitannya dengan masalah social dan politik.
4. Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional, karena masalah ekonomi dan ekosistem tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.

Selanjutnya Al Gore (1993) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan akan menjadi layak (*feasible*), maka pendekatan terhadap kebijakan ekonomi harus ditransformasi. Beberapa saran yang diajukan oleh Al Gore dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan :

1. Konsep GNP harus dirubah dengan memasukan benefit dan biaya

lingkungan.

2. Definisi produktifitas harus dirubah, agar menggambarkan perhitungan peningkatan atau penurunan kualitas lingkungan.
3. Pemerintah harus setuju untuk menghapus penggunaan tingkat bunga yang tidak sesuai dan mengadopsi cara-cara yang lebih baik untuk memperhitungkan dampak dari keputusan yang diambil terhadap generasi mendatang.
4. Pemerintah harus menghapus pengeluaran publik yang mendorong kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan.
5. Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan akurasi informasi tentang dampak lingkungan dari produk-produk dan menyampaikannya kepada konsumen.
6. Pemerintah harus mengadopsi program-program untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengkaji keuntungan dan biaya dari efisiensi lingkungan.
7. Negara-negara harus memperbaiki hokum-hukum antitrust mereka untuk menghadapi kerusakan lingkungan.
8. Pemerintah harus mensyaratkan penggunaan standar-standar tertentu untuk melindungi lingkungan dalam perjanjian kerjasama dan persetujuan internasional termasuk kerjasama perdagangan.
9. Masalah lingkungan harus dimasukan dalam criteria yang digunakan oleh

institusi keuangan internasional untuk evaluasi proposal bantuan Cuma-Cuma bagi dana pembangunan.

10. Pemerintah harus membuat penggunaan hutang yang meningkatkan bagi barter alam untuk mendorong penanganan lingkungan sebagai kompensasi atas keringan atau pembebasan hutang.
11. Pemerintah harus mengembangkan suatu perjanjian internasional yang menetapkan batas-batas emisi CO₂ oleh negara dan suatu pasar untuk perdagangan hak mengeluarkan emisi diantara negara-negara yang mempunyai jumlah yang berlebihan.

V. KRITERIA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada hakekatnya yang menjadi isu utama pembangunan berkelanjutan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Oleh sebab itu negara sedang berkembang harus berpandangan bahwa dirinya akan mencapai tingkat sosial dan ekonomi seperti negara maju sekarang, meskipun tidak harus melalui jalur dengan biaya lingkungan yang tinggi, sehingga planet bumi yang kita tempati ini tidak menghadapi ancaman global yang mengerikan.

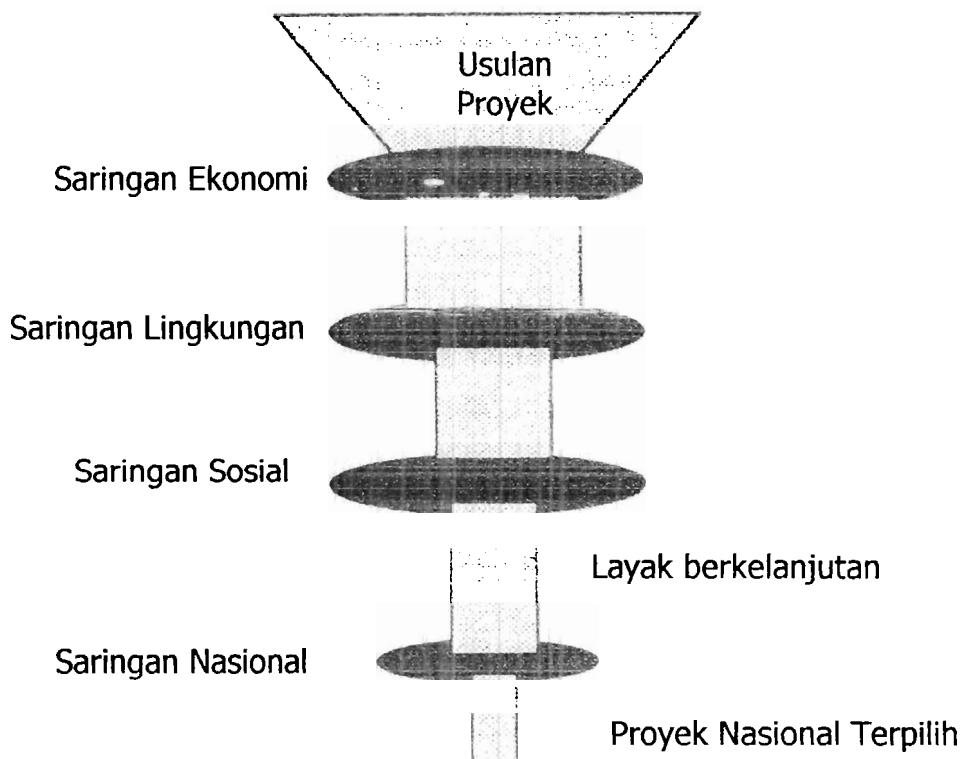
Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui berbagai Konferensi Para Pihak Ketiga (*Conferences of Parties, CoP*) konvensi perubahan iklim telah dilaksanakan, hingga akhirnya sampai pada CoP3 tahun 1997 di Kyoto sebagai sebuah tata cara atau mekanisme penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) yang kemudian dikenal dengan nama Kyoto Protokol. Di dalam Protokol ini telah disepakati target dan jadwal penurunan emisi yang harus dilakukan oleh negara maju, yaitu sebesar 5% dari tingkat emisi tahun tahun 1990 yang harus dicapai dalam periode 2008 – 2012. Untuk mencapai target penurunan emisi ada 3 mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu *Joint Implementation (JI)* yang diuraikan dalam Pasal 6, Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mecanism, CDM*) yang diuraikan dalam pasal 12, dan Perdagangan Emisi (*Emission trading, ET*) yang diuraikan dalam Pasal 17 Protokol Kyoto. Dari ketiga mekanisme tersebut, yang dapat dilaksanakan oleh negara yang sedang berkembang bersama negara maju hanya CDM saja,

sedangkan JI dan ET hanya bisa dilakukan antar negara maju.

Secara umum CDM merupakan mekanisme penurunan emisi yang berbasis pasar, yang memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara sedang berkembang pada berbagai sektor dalam rangka pencapaian target penurunan emisinya. Sementara negara sedang berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda nasionalnya sambil mencapai tujuan utama Konvensi seperti yang dijelaskan di atas. Mekanisme tersebut dapat dilakukan secara multilateral, bilateral, dan bahkan akhir-akhir ini berkembang cara-cara unilateral. Lateralisme ini tergantung pada sumber pendanaan dan sistem penyalurannya.

Kepentingan negara maju dalam CDM adalah penurunan emisi dengan biaya yang relatif rendah (*cost effectiveness*). Sedangkan kepentingan negara sedang berkembang adalah melanjutkan pembangunannya diberbagai sektor untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Upaya mengatasi perubahan iklim tidak boleh menghalangi apalagi menghentikan proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi agenda negara sedang berkembang dalam menyelenggarakan proyek-proyek CDM. Oleh sebab itu menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam proses pengembangan proyek CDM perlu ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penyaringan proyek-proyek CDM.

Ada 3 kriteria utama yang harus dipenuhi dalam penyaringan proyek-proyek CDM, di mana setiap kegiatan proyek harus; (a) menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); (b) meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*); dan (c) memperhatikan lingkungan (*environmental integrity*). Prosedur penyaringan calon-calon proyek CDM sebelum diputuskan layak dan memiliki kualifikasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 : Bentuk Penyaringan Proyek-Proyek CDM

(Sumber : Hamwey dan Szekely, 1998)

Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa yang menjadi saringan pertama dari sebuah proyek yang diusulkan adalah apakah rencana proyek yang diusulkan mampu menciptakan atau menunjang pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang semakin berkurang sehingga tercapai kesetaraan (equity). Dengan kata lain kelayakan secara ekonomi tidak hanya memperhitungkan aspek komersial berdasarkan rasio manfaat biaya (*cost-benefit ratio*) saja. Disamping itu partisipasi masyarakat harus didorong sehingga memungkinkan keterlibatan berbagai pihak yang lebih luas. Bila aktivitas ini melibatkan pihak swasta, maka prinsip-prinsip good corporate governance harus diadopsi agar berbagai pihak dalam lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Kegiatan proyek tidak hanya memantapkan kegiatan berusaha para pengusaha saja, tetapi juga harus mampu mendistribusikan rente atau manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata.

Setelah lolos dari saringan pertama, maka masuk ke saringan yang kedua, yaitu saringan lingkungan. Saringan ini perlu dilakukan, karena kegiatan pembangunan itu pada hakekatnya merupakan proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Dalam hal penyediaan bahan baku dan proses produksinya kegiatan pembangunan dapat membawa dampak pada lingkungan alam dan masyarakat di sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pengembangan proyek CDM

harus memperhitungkan ketahanan lingkungan (*environmental resilience*), tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungannya serta menjaga kelestarian sumberdaya alam sebagai bahan baku yang diolah.

Penilaian dampak proyek terhadap lingkungan tidak hanya untuk proyek-proyek yang berskala besar dan melibatkan orang banyak saja, melainkan juga terhadap proyek kecil yang diperkirakan akan memberikan dampak penting terhadap lingkungan. Proyek harus didiskualifikasi apabila dampak negatif yang terjadi makin banyak dan dampak yang positif makin sedikit.

Selanjutnya setelah lolos dari saringan lingkungan, maka usulan proyek tersebut akan dimasukkan lagi pada saringan sosial. Pentingnya saringan sosial ini didasarkan pada pandangan bahwa pembangunan harus bertumpu pada kapasitas manusia yang makin kuat. Pengembangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia secara terus menerus dapat dikaitkan dengan implementasi proyek-proyek nasional baik yang berskala kecil maupun besar. Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan yang tidak mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memperoleh bagian yang menentukan kesejahteraannya.

Kegiatan proyek yang diusulkan harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan proyek. Melalui partisipasi tersebut diharapkan proyek yang

diusulkan akan memberikan manfaat optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat yang makin kritis, pintar dan sejahtera yang telah terbentuk saat ini harus dipandang sebagai aset pembangunan di masa depan. Di samping kegiatan proyek harus berdampak langsung pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan serta pengentasan kemiskinan, proyek juga harus dapat memperbaiki kualitas hidup, layanan pendidikan dan kesehatan.

Bagi pengembangan modal sosial (social capital) diperlukan penghargaan atas harkat manusia itu sendiri. Pengakuan atas hak-hak, inovasi, dan partisipasi masyarakat harus mendapat tempat yang baik dalam perencanaan dan implementasi proyek. Proyek-proyek di sektor kehutanan yang melibatkan areal yang luas yang berpotensi terjadinya persinggungan kepentingan dengan hak-hak adat termasuk hak dalam menguasai lahan, perlu memperhatikan kriteria dan indikator yang dapat dipakai untuk mengukur apakah secara sosial proyek diterima masyarakat dan akan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Secara rinci, Murdiyarto (2003) telah mengembangkan kriteria dan indikator berkaitan dengan 3 komponen utama dalam menyaring apakah suatu usulan proyek memenuhi unsur keberlanjutan seperti disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria dan indikator Komponen Penyaringan Proyek
Dalam Melaksanakan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Komponen	Kriteria	Indikator
1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Kecukupan Dana	1. Sumber lokal tersedia
		2. Sumber eksternal pasti
		3. Sumber jangka panjang
	2. Kelestarian Sumberdaya alam	4. Teknik pemanfaatan lestari
		5. Risiko gangguan kecil
		6. Pemanfaatan sumberdaya alam secara legal
	3. Kemampuan berusaha	7. Kesehatan keuangan perusahaan
		8. Profesionalisme staf
		9. Adanya investasi ulang
	4. Penyebaran rente ekonomi yang seimbang/setara	10. Rente pemerintah
		11. Rente operator
		12. Rente penduduk setempat
2. Kelestaria Lingkungan	1. Pemeliharaan keakaragaman hayati	1. Variasi genetik/kekayaan spesies
		2. Perubahan habitat
		3. Perlindungan spesies langka
	2. Konservasi air	4. Kuantitas dan ketersediaan air
		5. Kualitas air
		6. Fungsi DAS
	3. Kerusakan lahan	7. Erosi dan sedimentasi
		8. Kesuburan tanah
		9. Lahan terlantar/tidak produktif
3. Kesejahteraan sosial	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1. Banyaknya wakil
		2. Komunikasi dua arah
		3. Pendapat yang dipertimbangkan
	2. Kesejahteraan sosial	4. Layanan pendidikan
		5. Layanan kesehatan
		6. Kualitas dan standar hidup
	3. Pengakuan atas kelembagaan lokal	7. Kelembagaan yang diadopsi
		8. Hubungan antar generasi
		9. Penyebarluasan
	4. Pengakuan atas hukum adat	10. Peranan pemimpin informal
		11. Proses pengambilan keputusan
		12. Persetujuan atas hak dan tanggungjawab atas lahan

IV. PENUTUP

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sangat kompleks terutama dalam masalah aplikasinya, sehingga dalam perwujudannya dibutuhkan pendekatan yang komprehensif baik pada tingkat lokal, regional maupun global. Secara teoritis konsep ini sangat ideal dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, namun secara praktis diperlukan keterlibatan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, sehingga kadang kala menjadi sulit dan kompleks dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui berbagai Konferensi Para Pihak Ketiga (*Conferences of Parties, CoP*) konvensi perubahan iklim telah dilaksanakan, hingga akhirnya sampai pada CoP3 tahun 1997 di Kyoto sebagai sebuah tata cara atau mekanisme penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) yang kemudian dikenal dengan nama Kyoto Protokol. Sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan Kyoto Protokol telah dikembangkan berbagai prosedur aturan main, yang akhirnya dirumuskan dalam bentuk Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*). Pelaksanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada kriteria ekonomi, lingkungan dan sosial akan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Diharapkan agar semua pihak, khususnya pemerintah sebagai agen pembangunan memiliki komitmen untuk selalu berpegang konsep pembangunan berkelanjutan, bukan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Gore, (1993). *Earth in the Balance : Ecology and The Human Sprit*, New York: the Penguin Group
- Djajaningrat, Surna T. 1997. Pengantar Ekonomi Lingkungan. LP3ES. Jakarta
- Hamwey, R and Szekeley, F. 1998. Practical Approaches in the energy sector. In: J. Goldemberg (Ed.). *Issues & Options The Clean Development Mechanism-UNDP*.
- Hardin, Garret. 1977. *The Tragedy of The Commons*, in G. Hardin and John Baden (editors), Managing the Commons, San Fransisco: W H Freeman and Co.
- Mudikdjo, Kooswardhono, 1990. Kumpulan Bahan Kuliah Pengantar Ekonomi Sumberdaya. Fakultas Pasca Sarjana, IPB Bogor.
- Murdiyarsa, Daniel. 2003. *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Munasinghe, Mohan 1992. Environmental Economics and Sustainable Development. The World Bank, Sector Policy and Research Staff, Environment Working Paper No. 3. Washington D.C.
- Salim, Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3ES. Jakarta.
- . 2001. Atur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soemarwoto Otto, (2001). *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Thomas, Vinod, et. al. (2000). The Quality Of Growth, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC. USA.
- World Commision on Environment and Development. 1987. Hari Depan Kita Bersama, Gramedia. Jakarta.
- Yakin, Addinul. 1997. Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Akademika Presindo, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2000. Ekonomi Energi, Teori dan Praktek. LP3ES, Jakarta.